Evaluasi Penerapan Whistleblowingsystem (WBS) Berdasarkan Pedoman KNKG dalam Mendorong
Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Purbalingga)
Hilmi Daffa Mubarok, Ihda Arifin Faiz, SE., M.SC., CMA., CIBA., CHRA
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
DAFTAR SINGKATAN x
INTISARI xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Pertanyaan Penelitian 9
1.4 Tujuan Penelitian 9
1.5 Manfaat Penelitian 9
1. Manfaat Teoritis 9
2. Manfaat Praktis 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1. Profil Inspektorat Kabupaten Purbalingga 11
2.1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga 13
2.1.2. Gambaran Umum Penganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi 15
2.2. Isomorfisme Institusional 17
2.3. *Whistleblowing System* (WBS) 18
2.4. *Whistleblower* 20
2.5. *Whistleblowing* 21
2.6. Fraud 22
2.7. *Whistleblowing System* di Sektor Publik 23
2.8. Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) 24
2.9. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) KNKG 25
2.10. Penelitian Terdahulu 38
2.11. Kerangka Penelitian 50

Evaluasi Penerapan Whistleblowingsystem (WBS) Berdasarkan Pedoman KNKG dalam Mendorong
Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Purbalingga)
Hilmi Daffa Mubarok, Ihda Arifin Faiz, SE., M.SC., CMA., CIBA., CHRA
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB III METODE PENELITIAN 52
3.1. Desain Penelitian 52
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian 53
3.2.1 Objek Penelitian 53
3.2.2 Lokasi Penelitian 54
3.3. Langkah Penelitian 55
3.4. Jenis dan Sumber Data 58
3.5. Teknik Pengumpulan Data 59
3.5.1. Penentuan Informan Penelitian 59
3.5.2. Teknik Pengumpulan Data 63
3.6. Uji Keabsahan Data 70
3.7. Teknik Analisis Data 70
3.8. Validitas dan Reliabilitas Data 72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 75
4.1. Evaluasi Aspek Struktural Berdasarkan SPP KNKG 75
4.1.1. Pernyataan Komitmen 75
4.1.2. Kebijakan Perlindungan Pelapor 78
4.1.3. Struktur Pengelolaan Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi 82
4.1.4. Sumber Daya 84
4.2. Evaluasi Aspek Operasional Berdasarkan Standar KNKG 88
4.2.1. Kewajiban Hukum untuk Melakukan Pelaporan Pelanggaran 89
4.2.2. Peran Manajer (Pimpinan) dalam Penerapan WBS 91
4.2.3. Pelaporan Anonim 92
4.2.4. Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran 94
4.2.5. Investigasi 96
4.2.6. Pelaporan 99
4.3. Aspek Perawatan KNKG 101
4.3.2. Komunikasi Berkala 103
4.3.3. Insentif Bagi Pelapor 104
4.3.4. Pemantauan Efektivitas dan Perbaikan Program 105
4.3.5. *Benchmarking* 106
4.4. Pembahasan 107
4.4.1. Kesenjangan Kepatuhan Formal dan Realitas di Lapangan 107
4.4.2. Penanaman Nilai-Nilai Integritas Pegawai 108
4.4.3. Kesenjangan Literasi Elemen Masyarakat 109
4.4.4. Hasil Evaluasi WBS 111

Evaluasi Penerapan Whistleblowingsystem (WBS) Berdasarkan Pedoman KNKG dalam Mendorong
Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Purbalingga)
Hilmi Daffa Mubarok, Ihda Arifin Faiz, SE., M.SC., CMA., CIBA., CHRA
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 114
5.1. Kesimpulan 114
5.2. Keterbatasan Penelitian 115
5.3. Saran Penelitian 116
5.4. Implikasi Penelitian 117
5.4.1. Implikasi Teoretis 117
5.4.2. Implikasi Praktis 117
REFERENSI 119
LAMPIRAN 122